

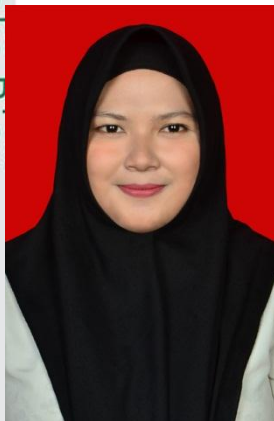


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) DI DESA KOTO TUO BARAT KECAMATAN
XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI



OLEH :

**RISKA AMINI
NIM 11575204728**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) DI DESA KOTO TUO BARAT KECAMATAN
XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pada Ilmu Administrasi Negara



OLEH :

RISKA AMINI

NIM 11575204728

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2019



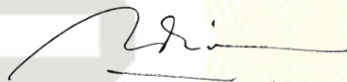
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RISK A AMINI
 NIM : 11575204728
 FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial/ Ilmu Administrasi Negara
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN
 STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
 DI DESA KOTO TUO BARAT KECAMATAN
 XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
 TANGGAL UJIAN : Jum'at, 27 September 2019

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**


Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M. Soc, SC.
 NIK. 130717108


MENGETAHUI:

DEKAN
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

KETUA PROGRAM STUDI
 Ilmu Administrasi Negara




Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, M.M
 NIP. 19620512 198903 1 003


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RISK A AMINI
 NIM : 11575204728
 FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial/ Ilmu Administrasi Negara
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN
 STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
 DI DESA KOTO TUO BARAT KECAMATAN
 XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
 TANGGAL UJIAN : Jumat, 27 September 2019

DISETUJUI OLEH
 KETUA PENGUJI

Henni Indrayani, SE, MM
Henni Indrayani, SE, MM
 NIP. 197008021998032003

ANGGOTA

PENGUJI I

Abdiana Hosa, S.Ap, MPA
Abdiana Hosa, S.Ap, MPA
 NIP. 1987071620150332003

PENGUJI II

Devil Deswimar, S.Sos, M.Si
Devil Deswimar, S.Sos, M.Si
 NIP. 130411027

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA KOTO TUO BARAT KECAMATAN X111 KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

OLEH:

RISKA AMINI

Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimanakah Proses Penerapan atau Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Koto Tuo dengan salah satu programnya yaitu program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS). Kualitas rumah tempat tinggal warga merupakan salah satu indikator kesejahteraan hidup warga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Proses Penerapan atau Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Koto Tuo Barat dengan salah satu programnya yaitu program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Indikator Pelaksanaannya yaitu: Pertama, sosialisasi program, kedua, syarat peserta program, ketiga, pelaksanaan program keempat, pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menetapkan beberapa narasumber yang penulis jadikan sebagai key informan adalah kepala desa, Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 2, Kepala Dusun 3, Kepala Dusun 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah Sosialisasi Program, Syarat peserta Program, Pelaksanaan program, Pengawasan dan Evaluasi, penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan dengan objek kegiatan bantuan Rehabilitasi Rumah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Nomor 47 tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. bantuan ini. Dapat disimpulkan program BSPS masih tetdapat masalah yaitu: 1. Belum meratanya penerima bantuan stimulasi perumahan swadaya tersebut, 2. Yang mengajukan tidak sesuai dengan yang mendapatkan bantuan

Kata Kunci: *Implementasi, Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA KOTO TUO BARAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018”.

Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan berilmu pengetahuan yang cangguh dan modern seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Teristimewah untuk Ayahanda tercinta Yusmar dan Ibunda Eri Murniati yang telah merawat, membesarkan, dan membimbing dengan penuh pengorbanan, kerja keras dan jerih payah untuk dapat mewujudkan cita-cita penulis untuk dapat terus mengejar cita-cita hingga menjadi Sarjana Sosial. Sungguh mulia pengorbananmu, dengan penuh kesabaran,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketabahan, kasih sayang, dan do'a serta dukungan untuk keberhasilan penulis hingga saat ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.AG., M.AG selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. MUH. SAID HM, M. Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
5. Ibuk Weni Puji Astuti, S.Sos M.Kp, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Bapak Afrinaldi Rustam, S.IP, M.Si selaku Penasehat Akademis, terimakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
7. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, SC selaku dosen konsultasi proposal dan pembimbing skripsi yang memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
8. Kepada Bapak Kepala Desa Koto Tuo Barat, Perangkat Desa, dan masyarakat desa koto tuo barat yang bersedia memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai di jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai aspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
10. Kepada adik saya Muhammad Ridho Ilahi dan Amelia Sakina yang membuat penulis terus semangat dan tersenyum. Dan seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan perhatian dan dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh guru-guru dan teman-teman dimana saya menimba ilmu mulai dari SD, SMP, SMA, khususnya SDN 011 Koto Tuo, SMPN 03 Koto Tuo, SMAN 1 Batu Bersurat.
12. Kepada Sahabat tercinta Sri Pela S.Sos terima kasih atas semangat dan dukungannya.
13. Kepada Muhammad Malindo terima kasih atas semangat dan dukungannya.
14. Kepada Sahabat karit ku Welly Yulanda, Rini julianti. SE, Yoli Novita SE, Zarah Hafsiyah, Wirdatul Jannah, Amd. Kep, Ismi Hidayati, Denny Nofrita, S.Gz terima kasih atas semangat dan dukungannya.
15. Kepada teman Seperjuangan Yeni Lusiana, Nova Lidayati, Nurmawan Dalimunthe, Efri Delimarni, Diah Hanip, Puput Rahayuning Tyas terima kasih atas semangat dan dukungannya.
16. Rekan-rekan Ilmu Administrasi Negara khususnya local ANA E semester VII Angkatan 2015, dan teman-teman KKN tahun 2018 Di Desa Tanjung, semoga kalian cepat nyusul seawat yang tidak bisa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis ungkapkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 29 Agustus 2019
Penulis

RISKA AMINI
NIM. 115204728

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Masalah.....	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Kebijakan Publik.....	17
2.2 Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin.....	19
2.2.1 Pengegertian masyarakat miskin.....	19
2.2.2 Konsep pemberdayaan masyarakat miskin	20
2.3 Konsep Pembangunan masyarakat miskin.....	22
2.4 Jenis-jenis program pemberdayaan masyarakat miskin.....	24
2.5 Implementasi kebijakan	27
2.6 Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	32
2.7 Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS)	32
2.8 Pemberdayaan masyarakat miskin dalam islam.....	43
2.9 Kajian Terdahulu.....	48
2.10 Defenisi Konsep.....	50
2.11 Konsep Operasional	51
2.12 Kerangka Pemikiran.....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN	53
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	53
3.2 Jenis dan Sumber Data	53
3.3 Metode Pengumpulan Data	54
3.5 Teknik Analisa Data	55
BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	56
4.1 Sejarah Desa Koto Tuo Barat	56
4.2 Kondisi Geografis	56
4.3 Batas Wilayah	57
4.4 Jumlah Penduduk Desa Koto Tuo Barat	58
4.5 Mata Pencarian Masyarakat Desa Koto Tuo	59
4.6 Agama	60
4.7 Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Koto Tuo Barat	61
4.8 Organisasi dan Tata Laksana	62
4.9 Tugas Pokok dan Fungsi	63
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
5.1 Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar	69
5.1.1 Sosialisasi Program	72
5.1.2 Syarat Peserta Program	76
5.1.3 Pelaksanaan Program	80
5.1.4 Pengawasan dan Evaluasi	82
5.2 Kendala dalam pelaksanaan program bantuan stimulasi perumahan swadaya (BSPS) di Desa koto tuo barat Kecamatan XIII koto kampar Kabupaten Kampar	67
BAB VI : PENUTUP	87

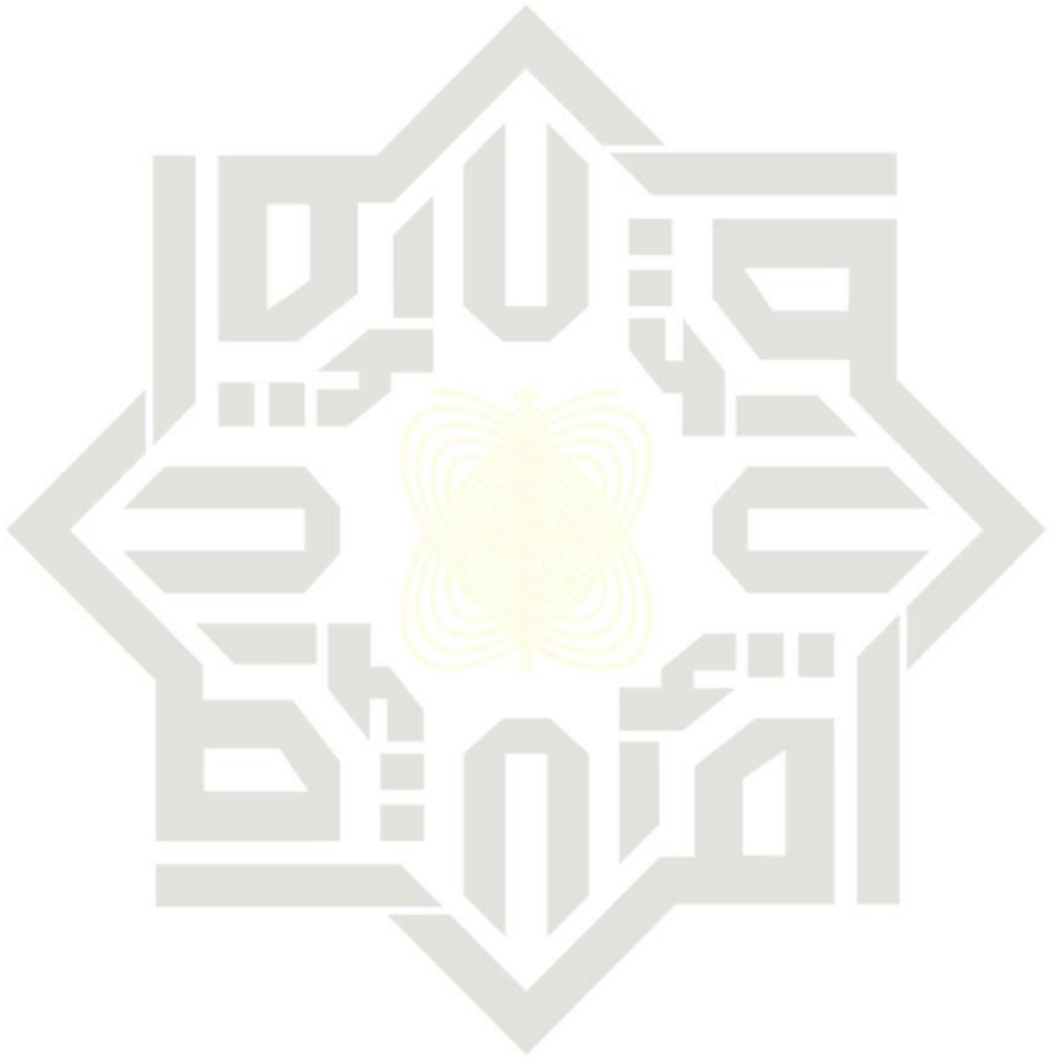
6.1 Kesimpulan	87
6.2 Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1. Jumlah masyarakat mulai dari usulan, penerima, dan yang tidak menerima bantuan stimulasi perumahan swadaya dengan dilihat dari yang tidak memiliki rumah tahun 2018	11
Tabel 1.2 Data masyarakat yang mendapatkan Pembangunan Baru (PB) serta penghasilan perbulan.....	11
Tabel 2.1 Indikator Penelitian	51
Tabel 3.1 Key informan penelitian.....	55
Tabel 4.1 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	58
Tabel 4.2 jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan desa koto tuo barat	58
Tabel 4.3 Rumah ibadah di desa koto tuo barat	61
Tabel 4.4 bangunan rumah tidak layak huni di desa koto tuo barat.....	62
Tabel 5.1 Sosialisasi Program	72
Tabel 5.2 Data masyarakat yang mendapatkan pembangunan baru (PB) serta penghasilan perbulan.....	79

UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masalah yang tidak pernah tuntas terselesaikan. Berbagai program telah dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikannya. Namun masih banyaknya rumah yang tidak layak untuk dihuni. Ini disebabkan oleh berbagai kendala. Dari mahalnnya harga lahan, harga material bangunan, hingga mahalnnya upah tukang. Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya menambah jumlah perumahan yang saat ini sudah mencapai 13,6 juta unit rumah di Indonesia. Dari jumlah ini penyelesaiannyapun akan memakan waktu yang cukup lama serta biaya yang luar biasa besarnya.

Menurut Korten (2002), Pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal. Oleh karena pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga. Memberdayakan masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat.

Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada



sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa di dasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Perumahan, Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik, yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memiliki rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dimana dalam Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman.

Dilihat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya merupakan salah satu program bantuan sosial Pemerintah Pusat di bawah naungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pemberian bantuan dana yang bersifat material bangunan.

Bantuan stimulasi adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya. Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Sehubungan dengan melaksanakan pembangunan masyarakat harus menyiapkan swadayanya, karena bantuan ini diwujudkan dalam bentuk barang, untuk mewujudkan bangunan rumah masyarakatnya harus berswadaya. Persyaratan Standar layak huni adalah kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah. Jenis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri atas Pembangunan baru (PB) dan Peningkatan kualitas (PK). Pembangunan rumah baru (PB) adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stimulan pembangunan baru dalam BSPS diberikan dalam bentuk dana atau bantuan lain untuk menstimulasi kegiatan pembangunan rumah baru yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Sedangkan Peningkatan Kualitas (PK) adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak huni. Stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dalam BSPS diberikan dalam bentuk dana atau bantuan lain untuk menstimulasi kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Sumber dana Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya berasal dari dana APBN. Besaran nilai BSPS per unit rumah ditetapkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

- a. Pembangunan Baru Rp 30 juta
- b. Peningkatan Kualitas Rp 15 juta

Penyaluran dana dilakukan dalam satu tahap oleh Bank/Pos penyalur ke rekening penerima bantuan sesuai dengan SK Penetapan Penerima Bantuan yang diterbitkan oleh PPK. Penyaluran dilakukan setelah dana cair dari KPPN ke rekening penampungan atas nama Satker Bantuan Rumah Swadaya dan diterimanya Surat Perintah Penyaluran (SPP).

Proses untuk mendapatkan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rumah layak huni di desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar melalui syarat-syarat yang telah ditentukan Pemerintah.

Penarikan dana oleh penerima bantuan terdiri dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memperlihatkan KTP asli penerima bantuan.
- Memperlihatkan daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2) yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang ke Kantor Layanan Bank/Pos Penyalur.
- Penarikan dana dilakukan dalam dua tahap masing-masing sebesar 50% yang ditunjukan dengan DRPB2 yng selanjutnya ditransfer langsung ke rekening toko/penyedia bahan bangunan.
- Penerima bantuan menandatangani slip penarikan dan setoran (transfer) ke rekening toko/penyedia bahan bangunan.
- e. Penerima bantuan dapat menarik dana BSPS dalam bentuk uang apabila penerima bantuan adalah jompo, cacat permanen, atau janda tua yang tinggal sendiri, untuk pembayaran ongkos tukang (paling tinggi 15% terhadap total bantuan).
- f. Buku Tabungan harus selalu dibawa setiap melakukan penarikan.
- Dalam hal terjadi perbedaan nama dan/atau nomor KTP yang tercantum dalam SK penetapan penerima bantuan karena kesalahan pengetikan maka data yang dipedomani adalah sesuai data yang tercantum dalam KTP asli dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa/lurah.
- Dalam hal penerima bantuan berhalangan tetap sehingga tidak dapat menarik dana BSPS di kantor layanan Bank/Pos Penyalur, maka dapat memberikan kuasa kepada suami/istri atau ahli waris yang tinggal serumah yang akan diperbaiki (dalam satu KK), yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/kelurahan/kepala desa dan membawa KTP asli penerima bantuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal lokasi penerima bantuan dengan kantor layanan Bank/Pos Penyalur jauh dan memerlukan biaya tinggi, maka Bank/Pos Penyalur harus mendatangi desa tempat penerima bantuan.

Kriteria calon penerima/subjek penerima dana Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya:

Warga negara Indonesia.

Masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan di bawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial.

3. Sudah berkeluarga.
4. Memiliki atau menguasai tanah.
5. Belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni.
6. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial.

Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:

- a. Memiliki keswadayaan dalam bentuk tabungan bahan bangunan.
- b. Telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan.
- c. Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS; atau
- d. Memiliki keswadayaan dalam bentuk tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan perumahan swadaya.

Dapat bekerja secara kelompok.

Kriteria bantuan untuk Peningkatan Kualitas (Rumah), Kriteria objek bantuan meliputi:

1. Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah

- a. Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya.
- b. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi.
- c. Tidak dalam status sengketa.
- d. Penggunaannya sesuai tata ruang

2. Kondisi bangunan memenuhi kriteria berikut :

- a. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV
- b. Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan.
- c. Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh, dan/atau
- d. Tingkat kerusakan rumah sebagai berikut:
 - 1) Rusak berat, ditandai dengan kerusakan 3 komponen rumah.
 - 2) Rusak sedang, ditandai dengan kerusakan 2 komponen rumah.
 - 3) Rusak ringan, ditandai dengan kerusakan 1 komponen rumah.

Kepala Keluarga penerima bantuan dengan membentuk kelompok yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Tugas kelompok adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membentuk pengurus kelompok terdiri dari ketua dan mengusulkan kepada kepala desa/lurah untuk ditetapkan serta membuat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya.
2. Membuka buku rekening kelompok penerima sasaran di bank.
3. Melakukan penilaian bagian rumah yang akan di perbaiki.
4. Menetapkan toko atau orang yang menjamin dalam penyediaan material bangunan.
5. Mengajukan usulan kebutuhan perbaikan rumah beserta dana yang diperlukan.
6. Ketua kelompok membuat laporan akhir kegiatan yang dilampiri dengan foto-foto masing-masing rumah yang telah di perbaiki dan laporan akhir pertanggungjawaban keuangan.

Kriteria bantuan untuk Pembangunan baru (Rumah), Kriteria objek bantuan meliputi:

1. Belum pernah memperoleh BSPS
2. Berpenghasilan rendah.
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni.
4. WNI yang sudah berkeluarga.
5. Memiliki atau menguasai tanah
 - a. Tanah yang dikuasai (sertifikat/surat keterangan).
 - b. Tidak dalam sengketa
 - c. Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari program ini jelas untuk memperbaiki kehidupan masyarakat miskin dan menuntaskan rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat di Desa Koto Tuo. Program ini juga sebagai wujud pelaksanaan program kemiskinan, Kependudukan dan Infrastruktur yang di rencanakan oleh pemerintah provinsi riau. Pembangunan BSPS ini juga di tunjukkan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin guna mendorong kegiatan produksi, ekonomi dan merupakan faktor-faktor penting dalam pengembangan masyarakat desa. Tercapainya sarana dan tujuan dari program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Koto Tuo Barat merupakan salah satu desa yang masyarakatan berpenghasilan rendah (MBR) di Kecamatan XIII Koto Kampar, salah satu penyebabnya adalah sumber mata pencarian masyarakat tidak ada yang menjanjikan. Semenjak Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar termasuk Desa Koto Tuo Barat dipindahkan gara-gara pembangunan proyek PLTA Koto Panjang maka terjadi penurunan pendapatan rata-rata masyarakat secara signifikan. Pembangunan proyek PLTA Koto Panjang bertujuan untuk mengantisipasi laju pembangunan di Provinsi Riau, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik jangka panjang, serta untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pada sektor hulu dan hilir.

Pembangunan proyek ini bertujuan untuk pengembangan wilayah baru, melalui pembangunan lokasi pemukiman baru pada tahun 1994, masyarakat yang dipindahkan memiliki lahan pertanian masing-masing seluas 2 Ha. Masyarakat yang mendapatkan lahan seluas 2 Ha dan Rumah harus telah menikah pada saat

mau dipindahkan kelokasi baru. Salah satu masyarakat yang dipindahkan yaitu masyarakat Desa Koto Tuo Barat di lokasi pemukiman baru, namun lahan pertanian seluas 2 Ha tersebut baru bisa di olah pada tahun 1999 dan juga lahan ini tidak terealisa dengan baik.

Hal itu dikarenakan lokasi lahan ada yang jauh dan itu menyebabkan masyarakat kurang merawat dan memelihara lahannya dan banyak yang beralih menjadi nelayan selain itu masyarakat kekurangan dana untuk mengembangkan lahan tersebut, maka wajar kalau kehidupan masyarakat di Kecamatan XIII Koto Kampar termasuk Desa Koto Tuo Barat seperti saat ini. Jumlah Kepala Keluarga miskin di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.

Salah satu untuk mengatasi kemiskinan sangat di desa koto tuo barat kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar maka di perlukan suatu proses pemberdayaan masyarakat di mana keberadaan suatu masyarakat sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, sebagaimana cara mengatasinya adalah melalui program bantuan stimulasi perumahan swadya (BSPS) untuk rumah layak huni di antara yang berhak menerimanya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dan belum memiliki rumah yang layak huni.

Desa Koto Tuo Barat merupakan salah satu desa di Kecamatan XIII Koto Kampar yang mendapatkan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2015. Program bantuan di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 dan 47. Dimana jenis program Bantuan Stimulasi Perumahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Swadaya yang ada di Desa Koto Tuo Barat adalah bersifat Peningkatan Kualitas (PK) rumah dengan bantuan dana yang bersifat material bangunan sebanyak Rp 1.000.000,00. Pemilihan calon penerima bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya yang ada di desa Koto Tuo Barat ini ditetapkan berdasarkan musyawarah.

Tabel 1.1

Jumlah Masyarakat mulai dari Usulan, Penerima, dan yang Tidak Menerima Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya dengan dilihat dari yang tidak memiliki rumah tahun 2018

No	Jenis Bantuan			
	Jenis Bantuan	Usulan (orang)	Penerima (orang)	Yang Tidak Menerima (orang)
1	Pembangunan baru (PB)	30	14	16
	Jumlah	30	14	16

Sumber: Kantor Kepala Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar 2018.

Tabel 1.2

Data masyarakat yang mendapatkan Pembangunan Baru (PB) serta penghasilan perbulan

Nama	Jumlah penghasilan perbulan	Yang mendapatkan	Yang tidak mendapatkan
Kadeni	Rp. 1.500.000	✓	
Aprizal	Rp. 1.500.000	✓	
Oki Purnama	Rp. 1.500.000	✓	
Syahrial	Rp. 1.500.000	✓	
Parmadi	Rp. 2.000.000	✓	
Zuherman Pelani	Rp. 2.000.000	✓	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Taupik	Rp. 2.000.000	✓	
8	Masrizal	Rp. 2.000.000	✓	
9	Dasmi Rianto	Rp. 2.000.000	✓	
10	Anuardi	Rp. 2.000.000	✓	
11	Muhijar	Rp. 2.000.000	✓	
12	Ahmad Busyairi	Rp. 2.000.000	✓	
13	Akmallul Iman	Rp. 2.000.000	✓	
14	Pahrul Rozi	Rp. 2.000.000	✓	

Sumber: Kantor Kepala Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar 2018.

Dari data diatas mereka semua tergolong masyarakat yang berpenghasilan rendah dan juga dari data di atas dapat dilihat calon penerima Bantua Stimulasi Perumahan Swadaya pada tahun 2018 yang di ajukan ke Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan rekomendasi dari Kepala Desa Koto Tuo Barat. Namun berbeda dari data yang diperoleh dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2018 Pembangunan Baru bahwa nama-nama yang di ajukan sebanyak 30 kepala keluarga hanya 14 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan.

Alasan dari yang menerima bantuan tersebut itu hanya 14 orang yang mendapatkan bantuan karena lebih layak karena mereka masih belum memiliki rumah dan sedangkan umur mereka sudah tua dan masih saja tinggal di rumah keluarga ataupun ngontrak, dan yang tidak mendapatkan pemerintah desa sudah mempertimbangkan karena bukan nya kurang pantas tapi ada yang lebih pantas untuk mendapatkan bantuan dari pada mereka lagi, itu alasan yang saya terima dari aparat desa, tetapi mereka yang tidak mendapatkan bantuan tersebut masih sangat pantas untuk di kasih bantuan karena penghasilan mereka masih rendah dan masih belum memiliki rumah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data diatas penulis menemukan fenomena-fenomena didalam pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya sebagai berikut:

Belum tepatnya sasaran didalam pelaksanaan Bantuan stimulasi perumahan swadaya (BSPS) . Hal ini bisa kita lihat dari yang mengajukan tidak sesuai dengan yang mendapatkan bantuan.

Belum meratanya penerima Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya. Hal ini terlihat banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

Padahal kalau dilihat dari segi yang tidak memiliki tempat tinggal nama-nama calon penerima di atas telah layak untuk mendapatkan bantuan karna bantuan ini sangat dibutuhkan. Jadi program ini belum sukses karena orang-orang yang mendapatkan bantuan tidak sesuai dengan yang di ajukan.

Berdasarkan masalah-masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA KOTO BARAT TUO KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar?
2. Apa saja kendala dalam Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar
2. Untuk mengetahui kendala Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Desa koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk keperluan teoritis terutama bagi kalangan akademis dan berguna untuk kepentingan yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu Administrasi Negara dalam kajian manajemen strategi.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dan bahan referensi bagi penulis yang ingin melanjutkan penelitian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Gambaran umum dari sistematika penulisan proposal adalah sebagai berikut:

I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

II : TINJAUAN TEORI

Pada bab ini penulis mengemukakan teori-teori yang relevan sebagai landasan dalam proposal ini, diantaranya adalah konsep teori, konsep operasioanal, teknik pengukuran dan hipotesis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis data, sumber data, sampel dan analisis data.

IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat desa, Struktur Organisasi, Sarana dan Prasarana, Visi dan Misi, Tugas Fungsi dan lainnya.

V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan hasil dari penelitian Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Desa Koto Tuo serta kendala apa saja yang mempengaruhi pengimplementasian dalam BSPS.

VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisa data dan saran-saran yang dapat diberikan dengan masalah yang diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Shore dan Wright dalam (Marzali 2012:20) Kebijakan adalah instrumen teknis dan rasional untuk menyelesaikan masalah. Titmuss mengatakan dalam (Suharto 2012:7) Kebijakan adalah sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya Menurut Thomas R. Dye dalam (Winarno 2008:17) Kebijakan adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

Melihat dengan memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik, pernyataan tentang tujuan, sasaran dan sarana diterjemahkan kedalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan kebijakan yang sama, dan mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program. Dalam rangka pencapaian kesesuaian antara tujuan dan sasaran kebijakan dengan kenyataan dilapangan, Menurut J.A.M. Mares dan Sunggono dalam Iril Fahmi (2013) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi atau kebijaksanaan, yaitu:

Isi Kebijaksanaan

Kebijaksanaan dikatakan gagal karena masih samanya isi dan tujuan kebijaksanaan, tidak memiliki ketetapan dan ketidaktegasan dalam bentuk intern maupun ekstern dari kebijaksanaan itu sendiri

b. Sosialisasi

Terjadinya kekurangan informasi, maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik terhadap objek kebijaksanaan ataupun kepada para pelaksana dari isi kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijaksanaan itu.

Dukungan

Didalam kebijaksanaan akan sangat sulit didalam pelaksanaannya jika tidak ada dukungan dari partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijaksanaan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Dalam pembagian potensi antara para aktor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang. Tahap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijakan sebelumnya, tahap implementasi baru terjadi setelah proses pengalokasian sumber daya dan dana yang telah disepakati. Studi implementasi program lebih menekankan pada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran kebijaksanaan.

2.2 Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

2.2.1 Pengertian Masyarakat Miskin

Masyarakat menurut Koentjaraningrat (2009: 115-118) adalah kestuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat yang bersifat kontinyu, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki empat ciri yaitu:

1. Interaksi antar warga-warganya.
2. Adat istiadat.
3. Kontinuitas waktu.
4. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga

Menurut Emile Durkheim (dalam soleman B. Taneko, 1984: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai kesimpulan manusia di dalamnya ada beberapa unsur yang mencakup.

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama.

Bercampur untuk waktu yang cukup lama.

Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi yang terikat oleh suatu kesatuan dan hidup bersama, memiliki kebiasaan, tradisi dan sikap yang sama yang menghasilkan kebudayaan

2.2.2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Sebagai masyarakat sering kali kita mendengar mengenai adanya program pembangunan wilayah dilingkungan tempat tinggal kita yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, baik yang yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non pemerintah (swasta), akan tetapi masih banyak sekali di antara masyarakat kita, baik yang menikmati secara langsung maupun tidak langsung hasil dari keberhasilan suatu proses pemberdayaan dilingkungan tersebut.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 1, ayat (8)). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu profesi mulia sebagai agen pemberdayaan perlu ditunjang oleh kompetensi yang

mampu memberdayakan masyarakat di era global sekarang ini (Oos M. Anwas, 2013 : 10)

Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan pada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri (Oos M. Anwas, 2013 : 49)

Edi Suharto (2009 :57) mendefinisikan secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Berdasarkan pada penelitian dan teori para ahli diatas, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada sekelompok orang yang terikat oleh satu kesatuan dan hidup bersama dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

3 Konsep Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan materil. Pembangunan diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sekelompok masyarakat di bidang ekonomi. Pembangunan seringkali diartikan dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.

Menurut Jameson dan Wilber dalam (Edi Suharto 2012:3) Pembangunan adalah sebagai suatu proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan. Siagian (2008:4) mengatakan bahwa Pembangunan adalah sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah maju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Selanjutnya Listyaningsih (2014:19) bahwa Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu merupakan suatu proses kegiatan usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat, mengarah kepada perubahan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, dan pada prinsipnya lebih menuju kearah yang lebih baik. Pembangunan suatu bangsa tidak hanya dilakukan dan dibedakan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekelompok orang saja melainkan juga harus melibatkan rakyat banyak yang juga akan menjadi subjek dan sekaligus objek dari pembangunan itu sendiri.

Pembangunan merupakan semacam arah perjalanan yang sedang ditempuh oleh manusia pada situasi tertentu, sehingga sejauh mungkin harus mengikuti sertakan masyarakat untuk berperan dalam menentukan pilihan-pilihannya yang mendasar. Dengan demikian jelaslah bahwa apabila perjalanan pembangunan ingin berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan, maka partisipasi masyarakat tidak bisa diabaikan dalam kerangka dasar proses pembangunan. Oleh karena itu pembangunan nasional yang melibatkan perubahan-perubahan dasar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional.

Dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan tersebut. Kecamatan yang terdiri dari desa-desa/kelurahan adalah sebagai salah satu objek dan sekaligus subjek pembangunan, karena di desalah tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga dengan menumbuhkan pembangunan pedesaan berarti membangun masyarakatnya. Sedangkan sebagai subjek desa merupakan pemberdayaan dari masyarakat sendiri melalui kewenangan pembangunan desa sesuai dengan kemampuan dan kemauan masyarakatnya.

Masyarakat pedesaan di Indonesia menurut sumber statistik Nasional yang diakui meliputi 80% dari keseluruhan wilayah/territorial Indonesia. Masyarakat pedesaan tidak hanya meliputi masyarakat kelompok masyarakat produsen

kecil/pengusaha niaga tani serta tenaga kerja yang bersangkutan dalam bidang tersebut.

Mengenai tingkat kemampuan warga masyarakat pedesaan umumnya di bidang teknologi pertanian dan usaha niaga tani masih dalam tingkat perkembangan tradisional dibandingkan dengan kemajuan di bidang teknologi dan usaha ekonomi dewasa ini. Apabila masyarakat pedesaan tersebut dibiarkan berkembang berdasarkan kemampuan sendiri, akan berakibat timbulnya jurang yang makin lebar dan mendalam dengan warga masyarakat lainnya yang sudah maju. Memahami masalah tersebut pemerintah kita telah mengadaptir konsepsi dan metode gerakan community development menjadi salah satu program guna mempercepat peningkatan potensi masyarakat pedesaan di Indonesia, yang untuk pertama kalinya merupakan kebijaksanaan PBB.

Sebagai kegiatan operasional, program-program kegiatan pembangunan direalisasikan dalam bentuk proyek-proyek yang ditetapkan sesuai dengan relevansinya. Proyek-proyek pembangunan masyarakat pedesaan adalah suatu proyek khusus sebagai bentuk realisasi pembangunan pedesaan.

2.4 Jenis-jenis Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Menurut Korten (2002), Pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal. Oleh karena pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memberdayakan masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa di dasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu.

Terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu:

1. Pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin.
2. Pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi.

Pendekatan pendampingan, yaitu selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang professional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisor terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Soegijoko, 1997)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jenis-jenis program Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin sebagai berikut:

Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai salah satu program prioritas pemerintah untuk menjamin dan memastikan para pelajar mendapatkan bantuan dana pendidikan terus dilanjutkan.

Program Indonesia Sehat (PIS)

Yaitu Untuk meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia,

c. Program Keluarga Harapan (PKH)

Yaitu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

d. Beras sejahtera (Rastra) atau Bantuan Sosial Pangan

Yaitu bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya.

Bantuan pangan Non Tunai (BPTN)

Yaitu digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras dan/atau telur, sesuai jumlah dan kualitas serta pada waktu dan tempat yang diinginkan.

Program Dana Desa

Yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa adat yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Yaitu bantuan pemerintah berupa stimulant bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umu (PSU).

Implementasi Kebijakan

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Ripley dan Franklin dalam (Winarno 2008:145) mengatakan bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah..

Dunn (2003:109) menyatakan bahwa Pelaksanaan atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Wahab (2014:203-211), bahwa tahapan-tahapan implementasi ditinjau dari:

- a. Keluaran Kebijakan (keputusan)
Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa.
- b. Kepatuhan Kelompok Sasaran
Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dan para pelaksana atau pengguna (aparatus pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Dampak Nyata Kebijakan
Adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan Undang-undang. Kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas (sebab-akibat) yang tinggi.
- d. Persepsi Terhadap Dampak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan tersebut.

Lebih jauh menurut mereka implementasi mencakup banyak macam kegiatan yaitu:

Badan-badan pelaksanaan yang ditugasi oleh Undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapat sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dana uang.

2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program.
3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Maksudnya adalah badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau batasan-batasan tentang kegiatan yang bisa di pandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Van meter dan Horn dalam Winarno, (2008:146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang



telah di tetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Maksudnya adalah tahap implementasi kebijakan tidak akan di mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran di tetapkan oleh keputusan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang di tetapkan dan dana di sediakan untuk membiayai pelaksanaan program tersebut.

Dalam keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

George C. Edward III (Winarno 2008:175-203) mengenai pandangan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Sumber daya (Resources) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan secara efektif. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari pada implementator kebijakan publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimalnya tiga hal, yaitu: Adanya tujuan dan sasaran kebijakan, Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan Adanya hasil kegiatan tersebut. Nama-nama semua program bantuan pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo sebagai berikut:

Adapun program pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin)
- Bantuan Siswa Miskin (BSM)
- Program Askeskin/Jamkesmas
- Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
- Program Rumah Layak Huni (PRLH)

Adapun program pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019)

- Program Indonesia Pintar (PIP)
- Program Indonesia Sehat (PIS)
- Program Keluarga Harapan (PKH)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Sosial Pangan
5. Bantuan pangan Non Tunai (BPNT)
6. Program Dana Desa
7. Program Rediva Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS)
8. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Itu lah nama-nama program bantuan untuk masyarakat kurang mampu pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah sehingga ada akhirnya akan mendapat suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.6 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Menuru Wikipedia dalam Anwar dan Adang (2013:260), kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi kekurangan hala-hal yang biasa untuk di punyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat biasanya sekaligus tumbuh pula berbagai nilai dan norma sosial yang baru, dan dapat mengakibatkan bergesernya ukuran-ukuran taraf kehidupan tertentu, yang kemudian menjadi suatu kelaziman bagi masyarakat. Ukuran kaya atau miskin dapat dilihat melalui kemampuan atau jumlah pemilikan nilai-nilai ekonomisnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang dan jasa yang diperlukan setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi terdiri dari komposisi pangan bernilai gizi cukup, keperluan air bersih, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan yang terutama tempat tinggal. Garis kemiskinan yang ditentukan oleh batas-batas minimum pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok biasanya dipengaruhi oleh:

1. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan.
2. Posisi manusia dalam lingkungan sekitarnya.
3. Kebutuhan obyektif manusia biasa hidup secara manusiawi.

Emil Salim Syani (2002:192) berpendapat bahwa untuk memperbaiki nasib mereka mesti ada campur tangan dan penyertaan aktif membantu mereka keluar dari bawah garis kemiskinan tanpa bantuan pemerintah, maka mereka akan semakin tidak mampu merebut bagian yang lebih layak dari pendapatan nasional bagaimana tidak demikian, betapa banyak rakyat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan itu belum lagi mau meningkatkan pendapatan, baru akan mulai saja sudah tersandung dengan harga yang lebih cepat melambung tinggi.

Secara garis besar kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga dimensi yaitu kemiskinan ekonomi, kemiskinan sosial, dan kemiskinan politik. Ketiga dimensi kemiskinan ini walaupun secara teoritis dapat dibedakan namun dalam kenyataannya satu sama lain saling mempengaruhi. Kemiskinan secara singkat dapat dirumuskan sebagai suatu standar hidup yang rendah, yaitu masih adanya kekurangan dibidang materi pada sejumlah golongan orang atau masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas kemiskinan pada masing-masing daerah berbeda-beda karena didasarkan pada lokasi yang berbeda dan standar kebutuhan hidup masing-masing daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) membatasi yang dikatakan miskin dari segi besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang serta aneka barang dan jasa.

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) adalah membantu masyarakat miskin agar dapat tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi oleh karena itu yang menjadi sasaran program ini adalah keluarga atau rumah tanggayang berpenghasilan rendah. Pelaksanaan program peningkatan keliatias rumah tersebut ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin yang ada di Desa Koto Tuo Barat. Adapun ukuran atau kriteria untuk ukuran sederhana layak huni yang dibangun yaitu rumah yang dilengkapi fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus).

2.7 Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS)

Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan suatu masalah yang tidak pernah tuntas terselesaikan. Walaupun telah berbagaia program telah di buat oleh pemerintah namun masih belum terselesaikan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Perumahan, Rumah adalah Bangunan Gedung yng berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sebagai sarana pembinaan keluarga, harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Rumah sangat berfungsi penting bagi setiap individu maupun keluarga. Jadi dalam mewujudkan rumah yang sesuai dengan fungsinya tersebut perlu adanya dorongan dari pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dimana dalam Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman.

Dilihat dari peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya merupakan salah satu program Bantuan Sosial Pemerintah Pusat di bawah naungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pemberian bantuan dana yang bersifat material bangunan.

Bantuan stimulasi adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya. Perumahan swadaya adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Seiring dengan melaksanakan pembangunan masyarakat harus menyiapkan swadaya, karena bantuan ini diwujudkan dalam bentuk barang, untuk mewujudkan bangunan rumah masyarakatnya harus berswadaya. Yang menjadi Latar Belakang terbentuknya dan munculnya Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya adalah menjadi tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Sehubung dengan pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan perumahan yang ditunjukkan melalui pemberian kemudahan pembangunan dalam bentuk stimulan rumah swadaya. Bentuk bantuan ini dimaksudkan untuk membangkitkan keswadayaan masyarakat dalam melakukan pembangunan/peningkatan kualitas rumah secara mandiri. Adapun maksud dan tujuan dari program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Maksud Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya adalah mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman yang dilaksanakan dengan cara:

- a. mewujudkan kegiatan berbasis komunitas
- b. mendampingi dan memberdayakan dalam rangka peningkatan kapasitas keswadayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- c. mengoptimalkan sumber daya lokal untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

2. Tujuan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya adalah:

- a. menyediakan instrumen penyelenggaraan perumahan swadaya yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung, memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan lingkungannya secara swadaya.
- b. menyediakan program dan kegiatan yang dapat membantu mendorong, memfasilitasi dan mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan yang dilakukan secara swadaya.
- c. mempercepat tersedianya rumah layak huni dalam lingkungan sehat, tertib aman dan nyaman dengan cara terjangkau.

Adapun Sasaran fungsional kegiatan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya adalah terselenggaranya pemberian dukungan, dorongan, fasilitasi bagi pembangunan dan pengembangan perumahan swadaya secara tertib, tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat waktu serta berkelanjutan. Adapun Sasaran operasional kegiatan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kapasitas dan kemampuan kelompok masyarakat dalam rangka pembangunan perumahan swadaya.

meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman, meningkatnya jumlah rumah layak huni dengan cara yang terjangkau, bagi MBR yang membangun rumah atau meningkatkan kualitas rumahnya secara swadaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Pendapatan Masyarakat Miskin

Batas garis kemiskinan itu, bias naik bias turun dan dipenuhi oleh berbagai faktor yakni angka inflasi dan harga kebutuhan dasar.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan pelaksanaan dimulai dari merencanakan, membangun dan mengelola pelaksanaan kegiatannya, serta mengawasi sangat diharapkan partisipasi aktif masyarakat sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab.

Transparan

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.

Adapun tugas dan tanggung jawab Koordinator Kabupaten/Kota dalam Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya yang dianggap sebagai Asisten Ahli Manajemen Konsultan Manajemen Wilayah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab Konsultan Manajemen Wilayah di kabupaten/kota meliputi:

1. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Fasilitator.
2. Mengendalikan pelaksanaan pendampingan BSPS.
3. Mengendalikan pengusulan proposal dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2).
4. Menghimpun, memeriksa dan menyampaikan laporan dari fasilitator kepada Pejabat Pembuat komitmen melalui Konsultan Manajemen wilayah.
5. Mengelola sistem informasi manajemen BSPS tingkat kabupaten/kota.
6. Menindak lanjuti temuan dan pengaduan masyarakat serta melakukan tindakan turun tangan sesuai kewenangan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya koordinator kabupaten/kota berkoordinasi dengan tim teknis kabupaten/kota. Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Desa/Lurah dalam BSPS. Selain menjadi anggota tim teknis kabupaten/kota, Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Melakukan sosialisasi BSPS kepada masyarakat.
2. Mengesahkan hasil pendataan calon penerima Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya dan menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi yang diperlukan oleh calon KPB bukti kepemilikan tanah, surat keterangan penghasilan yang tidak tetap
4. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menetapkan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Cara Penarikan dana oleh penerima bantuan terdiri dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperlihatkan KTP asli penerima bantuan.

Memperlihatkan daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2) yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang ke Kantor Layanan Bank/Pos Penyalur;

Penarikan dana dilakukan dalam dua tahap masing-masing sebesar 50% yang ditunjukan dengan DRPB2 yng selanjutnya ditransfer langsung ke rekening toko/penyedia bahan bangunan.

- d. Penerima bantuan menandatangani slip penarikan dan setoran (transfer) ke rekening toko/penyedia bahan bangunan;
- e. Penerima bantuan dapat menarik dana BSPS dalam bentuk uang apabila penerima bantuan adalah jompo, cacat permanen, atau janda tua yang tinggal sendiri, untuk pembayaran ongkos tukang (paling tinggi 15% terhadap total bantuan).

Buku Tabungan harus selalu dibawa setiap melakukan penarikan.

Dalam hal terjadi perbedaan nama dan/atau nomor KTP yang tercantum dalam SK penetapan penerima bantuan karena kesalahan pengetikan maka data yang dipedomani adalah sesuai data yang tercantum dalam KTP asli dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa/lurah.

Dalam hal penerima bantuan berhalangan tetap sehingga tidak dapat menarik dana BPS di kantor layanan Bank/Pos Penyalur, maka dapat memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuasa kepada suami/istri atau ahli waris yang tinggal serumah yang akan diperbaiki (dalam satu KK), yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/kelurahan/kepala desa dan membawa KTP asli penerima bantuan.

Dalam hal lokasi penerima bantuan dengan kantor layanan Bank/Pos Penyalur jauh dan memerlukan biaya tinggi, maka Bank/Pos Penyalur harus mendatangi desa tempat penerima bantuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang penanganan fakir dan miskin di Kabupaten Kampar bahwa masyarakat yang berpenghasilan rendah atau kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermanfaat, kemiskinan harus ditanggulangi secara bersinergi oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha. Penanganan fakir miskin bertujuan untuk:

1. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin
2. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin.

Salah satu bentuk penanganan masyarakat fakir dan miskin di Kabupaten Kampar yaitu: (1) Penyediaan Perumahan, (2) Bantuan Perbaikan Rumah, dan (3) Bantuan sarana dan prasarana pemukiman. Pemerintah Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa di Kabupaten Kampar penetapan masyarakat yang

berpenghasilan rendah didasari atas jumlah pendapatan bersih masing-masing kepala keluarga. Apabila sebuah keluarga yang terdiri dari satu orang istri dan dua orang anak dengan penghasilan bersih sebesar Rp 1,3 juta, perbulannya, maka keluarga tersebut termasuk dalam keluarga yang berpenghasilan rendah dengan kategori miskin.

Begitu pula halnya, bila satu keluarga yang terdiri dari kepala keluarga, satu orang istri dan memiliki anak lebih dari dua orang dengan penghasilan bersih rata-rata Rp 1,5 juta perbulannya, juga masih termasuk dalam kategori keluarga berpenghasilan rendah dengan kategori miskin. Dengan cara penetapan keluarga masyarakat berpenghasilan rendah atas dasar pendapatan bersih, masing-masing keluarga baik yang besarnya Rp 1,3 juta atau besarnya Rp 1,5 juta maka persentase keluarga yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Kampar tercatat sebesar 21,48 persen.

Program pembangunan Perbaikan Rumah di Desa Koto Tuo Barat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 dan 47 tahun 2015 dan Nomor 47 tahun 2015, karena program pembangunan ini merupakan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat dengan metode pelaksanaan berdasarkan prinsip pengelolaan. Untuk mensukseskan program ini tentunya sangat diharapkan peran serta masyarakat.. Program ini diselenggarakan bersama masyarakat secara terbuka berdasarkan musyawarah serta melibatkan masyarakat baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beda hal nya dengan keberhasilan dari program ini dilihat dengan terbangunnya rumah yang layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin yang ditandai dengan tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat waktu serta berkelanjutan. Melalui program bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan papannya, karena masyarakat yang berpenghasilan rendah atau kemiskinan pada umumnya membuat masyarakat hanya memenuhi kebutuhan pangan dan sandang. Perlu adanya peran yang serius dari pemerintah dalam menangani angka kemiskinan dan melalui program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni sebagaimana mestinya.

2.8 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Islam

Kemiskinan termasuk persoalan kemasyarakatan, yang faktor penyebabnya dan tolak ukur kadarnya dapat berbeda akibat perbedaan lokasi dan situasi. Karena itu Al-Quran tidak menetapkan kadarnya dan tidak memberi petunjuk operasional yang rinci untuk pengentasannya. Bila dilihat dalam konteks agama sebenarnya jauh lebih jelas. Dalam Islam dibedakan secara tegas antara mereka yang disebut sebagai fakir dan miskin mereka yang masuk golongan miskin.

- a. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak mampu bekerja, atau hanya memiliki sebagian dari kebutuhan hidupnya Menurut Djazuli (2009:221). Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan dalam memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya lebih banyak atau setengah dari orang fakir Menurut Djazuli (2009:222).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam memandang kemiskinan adalah suatu problem yang memerlukan solusi, bahkan sebagai bahaya yang mesti segera diatasi dan dicarikan jalan keluar. Dalam pengentasan kemiskinan, Islam mendahulukan langkah-langkah positif dan solusi-solusi prosedural yang realistis. Dan ternyata, jalan keluarnya telah diatur dalam Islam sejak lama, dengan kewajiban bekerja bagi yang mampu, shadaqah, dan zakat. Oleh karenanya, dalam sebuah negara dan pemerintahan yang menerapkan syariat-syariat Islam, pandangan kemiskinan yang kita saksikan setiap harinya, bukan tidak mungkin akan terhapuskan sama sekali.

Islam pada dasarnya adalah agama yang memiliki konsep keadilan, dengan panduan-panduan prinsip berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam berbagai hal seperti Ekonomi, Politik, Kultural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Islam juga tentunya mengatur hal yang berhubungan dengan kehidupan umat manusia. Sebagai aparatur negara, pemerintah berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting diantaranya adalah bagaimana meringankan dan membantu agar dapat memudahkan beban mereka.

Al-Qur'an mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya, bagi yang tidak memiliki kemampuan material, maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ad-Dzariyat



Artinya : “Dan Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian”. (QS Ad-Dzariyat ayat 19)

Dari ayat Al-qur'an diatas, terlihat jelas bahwa secara tegas Al-Qur'an menentang mereka yang enggan berpartisipasi (walau dalam bentuk minimal) sebagai orang yang telah mendustakan Agama dan hari kemudian. Menurut pandangan islam, tidak dapat dibenarkan seseorang yang hidup ditengah masyarakat islam, sekalipun ahl Al-Dzimah (warga negara non muslim), menderita lapar, tidak berpakaian, menggelandang (tidak bertempat tinggal) dan membujang. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Al-Quran menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, yang secara garis besar dapat dibagi pada tiga hal pokok, yaitu:

1. Kewajiban setiap individu
2. Kewajiban orang lain/masyarakat
3. Kewajiban pemerintah.

Kewajiban terhadap setiap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh kitab suci Al-Quran, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya. Dalam konteks inilah Al-Quran menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya,

dan kewajiban setiap individu untuk membantu anggota masyarakatnya. Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting diantaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut diatas belum mencukupi.

Menurut suyanto (1995:55) kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak. Mereka menjadi bagian dari komunitas dengan struktur dan kutur pedesaan Kiri-kira separuh jumlah itu benar-benar berada dalam kategori sangat miskin. Nampak, tidak terlalu berlebihan apabila dinyatakan bahwa medan perang melawan kemiskinan dan kesenjangan yang utama sesungguhnya berada di desa. Oleh karena itu, usaha memberdayakan masyarakat desa serta perang melawan kemiskinan dan kesenjangan di daerah pedesaan masih harus menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan pada masa-masa mendatang (Usman, 1998:30).

Untuk mengatasinya, dibutuhkan kerja sama untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara melakukan perberdayaan terhadap mereka yang terbelakang karena memang pada dasarnya islam adalah agama pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S Al Maa`uun ayat 1-7 yang berbunyi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْدينِ - ١- فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ
 - ٢- وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ - ٣- فَوَيْلٌ
 لِلْمُصَلِّينَ - ٤- الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ - ٥-
 - الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ - ٦- وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ - ٧-

Artinya : “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan Agama?, maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan”. (QS Al-Ma’un ayat 1-7)

Pemberdayaan dalam pandangan islam harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini juga sejalan yang sangat penting dalam memajukan umat islam. Oleh karena usaha memberdayakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan serta kesenjangan menjadi fenomena yang semakin konfleks, pembangunan pedesaan juga tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih dari itu adalah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak tergantung dan dapat lepas dari berlembu struktur yang membuat hidup sengsara.

Hal ini bias di lakukan dengan penciptaan kondisi yang dapat mendorong kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan hak-hak ekonomi, sosial dan politik dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemandirian

masyarakat (Aziz, 2009:75). Cara mewujudkan tatanan masyarakat seperti itu adalah dengan sebuah penyelenggaraan dakwah yang baik. Pelaksanaan dakwah dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran apabila dilakukan dengan sistem pengelolaan yang baik pula.

9 Kajian Terdahulu

Muhammad Maksun 2012. Judul “Analisis Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Linggi Kecamatan Ramabab Kabupaten Rokan Hulu”. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya peran serta masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk pemanfaatan dana bantuan pembangunan desa bidang pengadaan Rumah Layak Huni, kurangnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dana bantuan Desa untuk pengadaan Rumah Layak Huni tersebut yang berakibat terlambatnya proses pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan, belum maksimalnya pemanfaatan dana bantuan pembangunan desa untuk kepentingan pengadaan Rumah Layak Huni di desa akibatnya perencanaan pembangunan yang telah disusun tidak dapat direalisasikan dengan optimal.

Iril Fahmi. 2013. Judul “Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Program RTLH 2011 di Kabupaten Karimun)”. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya sosialisasi secara formal kepada masyarakat tentang Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, yang ditandai dengan ketidaktahuan masyarakat akan berlakunya kebijakan tersebut. Dalam proses pencairan dana bantuan tersebut banyak

ditemukan adanya indikasi penyelewengan dana bantuan oleh aparat yang mengurus. Dari hasil analisis didapatkan bahwa program kemiskinan di Kabupaten Karimun belum terlaksana dengan baik.

Wahyuni Pamelastari 2014. “ Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir”. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak tepatnya cara dalam penentuan yang berhak mendapatkan program rumah layak huni yang mana dilakukan dengan pengundian yang mana cara tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yang mana ini terjadi ketidakadilan dalam masyarakat sehingga mana yang seharusnya terlebih dahulu mendapatkan atau yang paling membutuhkan tidak mendapatkan.

Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian ini memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu, Belum tepatnya sasaran didalam pelaksanaa Bantuan stimulasi perumahan swadaya (BSPS) . Hal ini bisa kita lihat dari ada rumah yang lebih layak untuk mendapatkan bantuan namun kenyataannya tidak mendapatkan bantuan. Belum meratanya penerima Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya. Hal ini terlihat banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Padahal kalau dilihat dari segi tingkat kerusakan tempat tinggal nama-nama calon penerima di atas telah layak untuk mendapatkan bantuan karna bantuan ini sangat dibutuhkan. Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan program bantuan stimulasi perumahan swadaya di desa Koto Tuo Barat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana bantuan ini berjenis Peningkatan Kualitas (PK) dan Pembangunan Baru (PB).

10 Definisi Konsep

Untuk memudahkan analisa agar mendapat kesatuan, pengertian dalam penelitian, maka penulis memberikan Definisi Konsep sebagai berikut:

Kebijakan adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pemberdayaan masyarakat merupakan peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal.

3. Implementasi Kebijakan merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi. implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur birokrasi.

4. Pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.

Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.

11 Konsep Operasional

Tabel 2.1 : Indikator Penelitian

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (Bsps) Di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2018	1. Sosialisasi program	a. Tahap pra pelaksanaan atau tahap persiapan program b. Tahap pelaksanaan program
	2. Syarat peserta program	a. Memenuhi kriteria yang telah di tentukan.
	3. Pelaksanaan Program	a. Persiapan b. Pelaksanaan kegiatan c. Evaluasi dan Monitoring
	4. Pengawasan dan Evaluasi	a. Mengetahui jalannya pekerjaan b. Memperbaiki kesalahan c. Mengetahui hasil pekerjaan d. Sebagai Grading e. Sebagai alat seleksi f. Sebagai bimbingan g. Sebagai alat prediksi

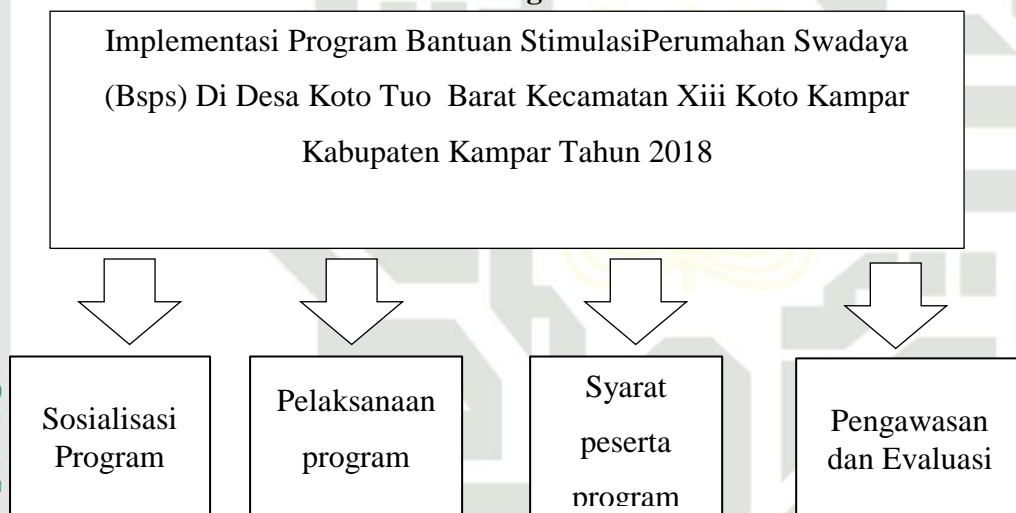
Sumber: Peraturan Menteri PUPR RI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

12 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam Sugiyono, (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis akan lakukan pada semester genap Tahun 2019 sampai selesai. Dimana penelitian dilakukan di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih Desa Koto Tuo Barat sebagai tempat penelitian adalah karena Desa tersebut dimana masih banyak terdapat masyarakat berpenghasilan rendah dan yang sangat membutuhkan Rumah yang Layak untuk Huni.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Menurut Istijanto (2006:32) data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.

Yaitu data hasil dari observasi berupa pendapat responden tentang kebijakan program bantuan stimulasi perumahan swadaya berbasis komunikasi serta data hasil wawancara dengan responden untuk memperjelas hasil dari observasi tersebut.

2. Data Sekunder

Istijanto (2006:27) mengatakan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Yaitu data yang diperoleh dari kepala desa Koto Tuo beserta perangkatnya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2014:188-198) sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang di inginkan .

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang di wawancarai yang mengetahui pasti masalah pelaksanaan program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Desa Koto Tuo Barat.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen.

Tabel 3.1 : Key Informan Penelitian

	Nama	Jabatan
1	Rinaldi,S.Pdi	Kepala desa
2	Zulpani	Kadus Dusun 1
3	Husni Fadul	Kadus Dusun 2
4	Jon Hendri	Kadus Dusun 3
5	Muhammad Ansyor	Kadus Dusun 4

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

3.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik likert Sugiono (2013: 107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai objek ukur untuk menyusun item-item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi positif sampai dengan sangat negatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Koto Tuo Barat

Sekilas dari nama Desa Koto Tuo berdasarkan Sejarah bahwa nama Koto Tuo berarti kata Kesepakatan Lama Bersama disuatu tempat /Nagari pada masa Pertama kali Islam masuk di Sumatra, masa itu para saudagar dari Timur Tengah mengirimkan Surat melalui Aceh ke beberapa Desa Surat tersebut berisikan Kalimah Dua Kali Syahadat, masa itu banyak penduduk yang tidak bisa membaca kalimat tersebut, maka setelah sekian lama dan sekian banyak orang yang tidak bias membaca dan maknanya, namun di suatu hari ada salah seorang yang tau dan bisa membaca dan mengartikannya yaitu di sebut kelompok bagian dari masyarakat itu diberi gelar *Malin Putih*, maka di adakan kesepakatan bersama Kata yang lama (kata kesepakatan lama di suatu tempat) karna tempat ini di jadikan sebagai tempat berkesepakatan satu kata maka jadilah sebutan Koto Tuo pada masa itu.

4.2 Kondisi Geografis

Desa Koto Tuo Barat merupakan salah satu bagian integral dari wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Desa Koto Tuo mempunyai luas wilayah dataran 10.000 Ha dan perbukitan 6000 Ha. Sebagian wilayahnya sudah digunakan untuk perumahan rakyat dan perkebunan. Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketinggian tanah dari permukaan laut diperkirakan 186 meter. Serta keadaan suhu rata-rata $20^{\circ} - 32^{\circ}\text{C}$.

4.3 Batas Wilayah

Desa Koto Tuo Barat merupakan salah satu desa dari 8 (delapan) desa yang termasuk ke dalam daerah genangan PLTA Koto Panjang. Pemindahan penduduk dari desa Koto Tuo lama di mulai pada tahun 1990 dan baru berbentuk permukiman pada tanggal 28 maret 1994. Secara adminitrastif Koto Tuo termasuk ke dalam wilayah kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Secara Adat wilayah Desa Koto Tuo merupakan salah satu desa dalam wilayah adat andiko 44. Berikut ini adalah batas-batas wilayah desa Koto Tuo :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Koto Propinsi Sumatera Barat
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Muara Takus
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Koto tuo

Desa Koto Tuo dipimpin oleh seorang kepala desa yang diangkat oleh pemerintah daerah dengan pilihan langsung oleh masyarakat. Desa Koto Tuo memiliki 10 Rukun Warga dan 25 Rukun Tetangga dan 5 Kepala Dusun .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jarak desa Koto Tuo dari ibukota Kecamatan hanya 7 km dan jarak dari ibukota kabupaten Kampar 60 km, sedangkan dengan ibukota propinsi riau 170 km.

4.4 Jumlah Penduduk Desa Koto Tuo Barat

Jumlah total penduduk desa Koto Tuo pada tahun 2018 adalah **1.191 jiwa, terdiri dari 299 (KK) Kepala Keluarga**. Pertambahan penduduk desa Koto Tuo dalam setahun belakangan ini antara lain :

- a. Jumlah yang lahir 49 Orang
- b. Jumlah yang meninggal 16 orang
- c. Jumlah pendatang tetap 18 orang
- d. Jumlah penduduk yang keluar 14 orang

Jumlah penduduk Desa Koto Tuo Barat berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	591
2	Perempun	600
Jumlah		1.191

Sumber: Kantor Desa Koto Tuo 2018

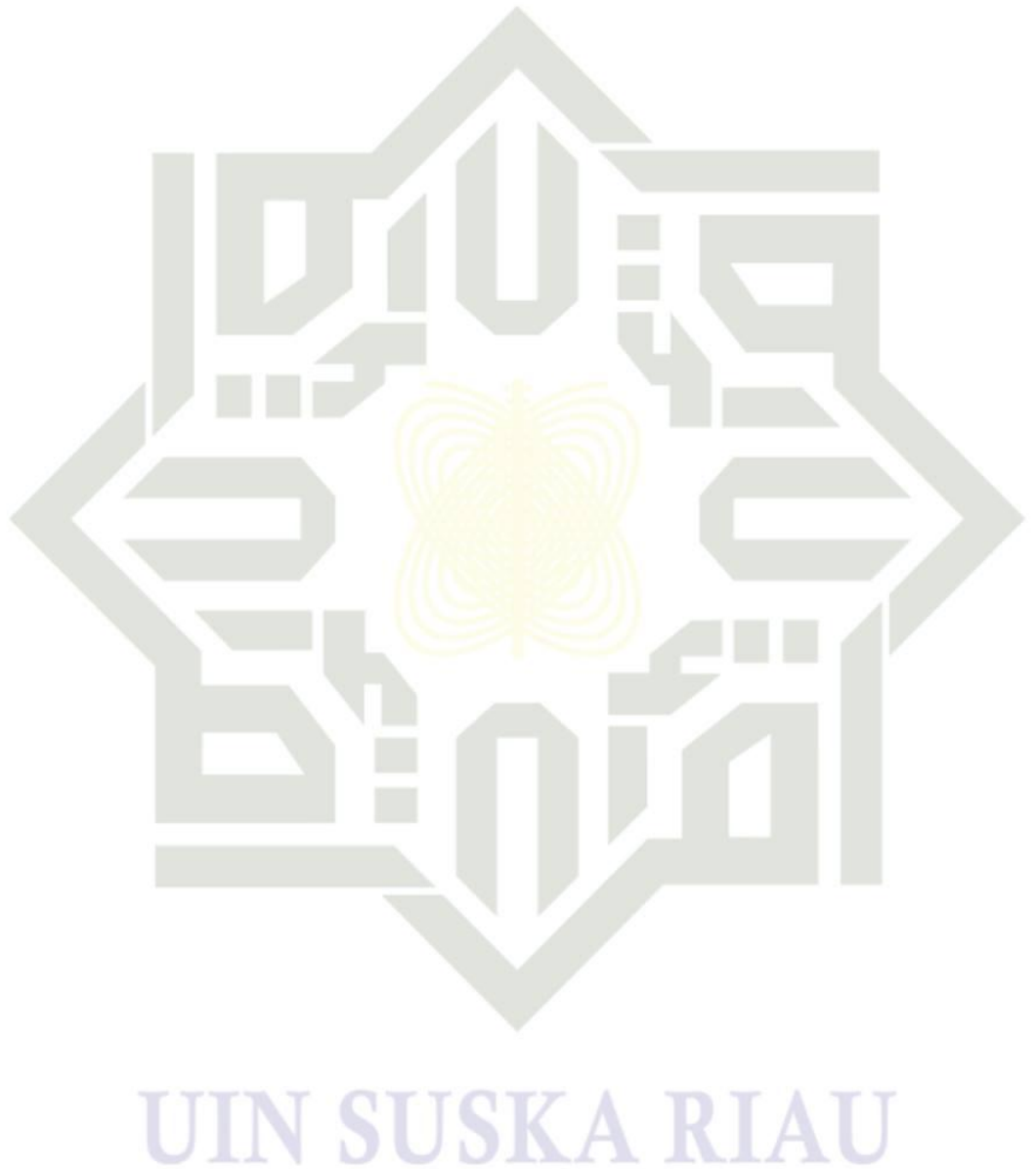
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk desa Koto Tuo berimbang antara jenis kelamin laki-laki 591 dan perempuan 600. Dari data diatas jelaslah bahwa laki-laki lebih banyak dari perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Mata Pencarian Masyarakat Desa Koto Tuo

Mata pencaharian masyarakat desa Koto Tuo pada umumnya adalah Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pedagang,, Pegawai Negeri, Jasa, Perkebunan dll, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.3: Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan Desa Koto Tuo Barat

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah (Orang)
1	Petani	412
2	Pedagang	51
3	PNS	8
4	Tukang	78
5	Guru	23
6	Bidan/Perawat	3
7	Polri	1
8	Pensiunan	1
9	Nelayan	78
10	Swasta	112
Jumlah		788

Sumber: Kantor Desa Koto Tuo tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis mata pencarian penduduk di desa Koto Tuo Barat yang paling banyak adalah Petani sebanyak 412 orang, sedangkan jenis mata pencarian yang paling sedikit adalah Pensiunan dan Polri sebanyak 1 orang.

4.6 Agama

Pasal 29 ayat 1 mengatakan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Desa Koto Tuo Barat yang berpenduduk 1.191 jiwa yang terdiri dari 305 KK dari berbagai suku, dalam kehidupan masyarakatnya berjalan dengan baik dan agama yang di percayai penduduk desa Koto Tuo Barat adalah agama Islam sebanyak 1.191 jiwa, disamping itu masyarakat desa Koto Tuo Barat mempunyai rumah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4: Rumah Ibadah di Desa Koto Tuo Barat

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Mushollah	4
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Wihara	-
Jumlah		5

Sumber: Kator Desa Koto Tuo tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah rumah ibadah di desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar berjumlah 5 buah 1 mesjid 4 mushollah dan keseluruhan merupakan rumah umat muslim sementara itu rumah ibadah untuk non muslim tidak ada satupun.

4.7 Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Koto Tuo Barat

Koto Tuo merupakan daerah pindahan Penduduk Desa Koto Tuo (lama) yang wilayah desa (lama) termasuk wilayah genangan PLTA Koto Panjang . sebahagian besar masyarakat masih menggunakan rumah pembagian atau jatah pemindahan PLTA Koto Panjang. Sehingga kebanyakan rumah penduduk masih terbuat dari papan. selain itu kondisi rumah penduduk pada umumnya dalam keadaan kurang baik (tidak layak huni) meskipun sebahagian kecil diantaranya telah dibangun dan dikembangkan menjadi rumah permanen (semen). Adapun banyak rumah tidak layak huni di Desa Koto Tuo bisa dilihat pada tabel berikut sesuai dengan letak rumah perdusun:

Tabel 4.5 : Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Koto Tuo

No	Dusun	Jumlah Rumah
1	I	18
2	II	5
3	III	10
4	IV	9
Jumlah		42

Sumber: Kantor Desa Koto Tuo tahun 2018

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak terdapat bangunan rumah tidak layak huni di desa Koto Tuo.

4.8 Organisasi dan Tata Laksana

Struktur organisasi desa Koto Tuo berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 84 tahun 2015 adalah:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha
 - b. Kepala Urusan Keuangan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Kesejahteraan
5. Kepala Seksi pelayanan
6. Kepala Dusun

Tugas Pokok dan fungsi berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 84 tahun 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.9 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 84 Tahun 2015

1. Kepala Desa

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - 1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - 3) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - 4) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- 5) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (Mudes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah :

- 2) Menyalurkan Aspirasi
- 3) Merencanakan APBDes
- 4) Mengawasi Pemerintahan Desa

3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

- a. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

- a. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi penyusunan program dan kebijakan pemerintahan desa dalam rangka pembangunan desa, penyusunan program dan rencana kegiatan pembangunan, penyusunan data dan bahan laporan pelaksanaan pembangunan.

5. Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

- a. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- b. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

6. Kepala Dusun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala

Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto

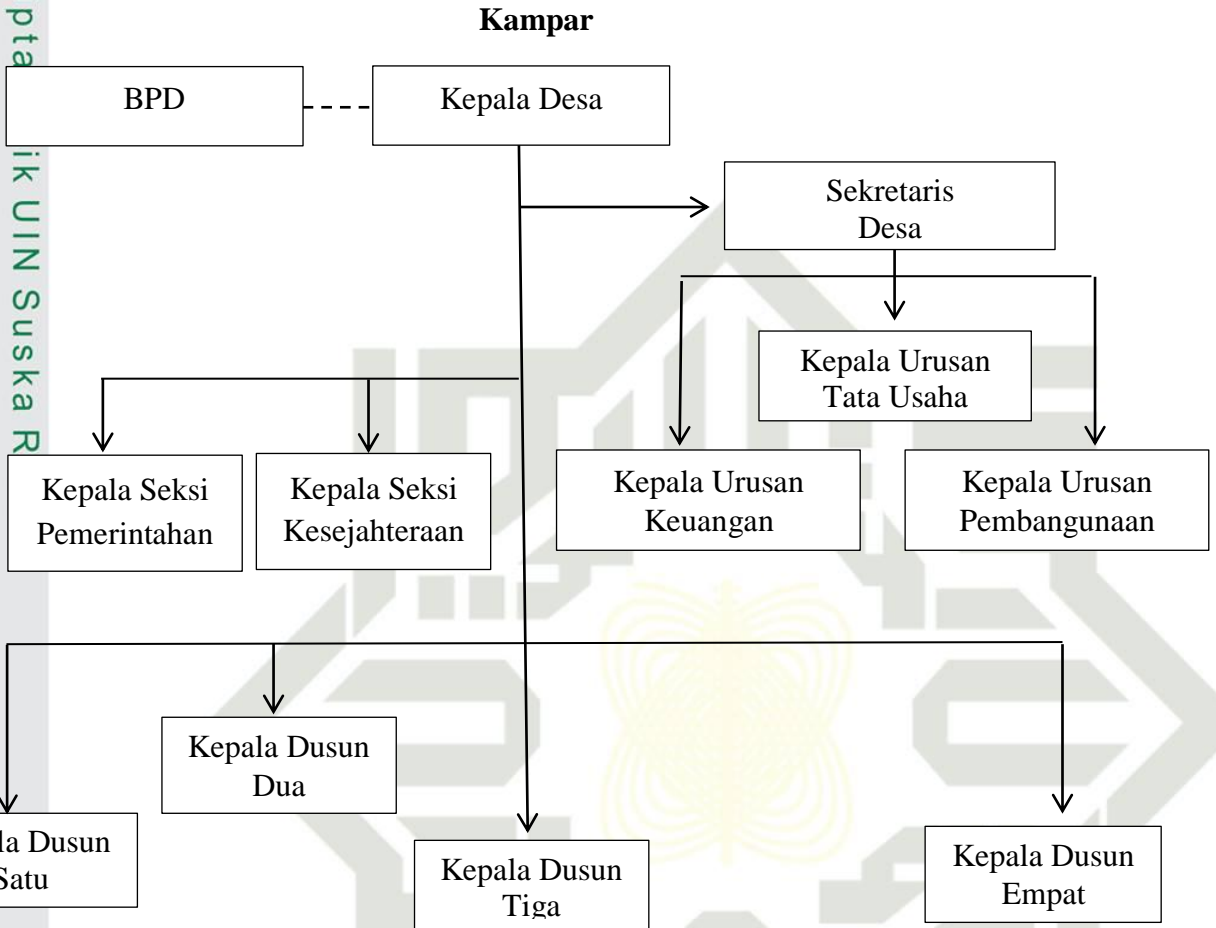
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: Kantor Kepala Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar tahun 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Nomor 47 tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur berjalan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Walaupun Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar berjalan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan, namun masih terdapat berbagai macam kendala-kendala. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

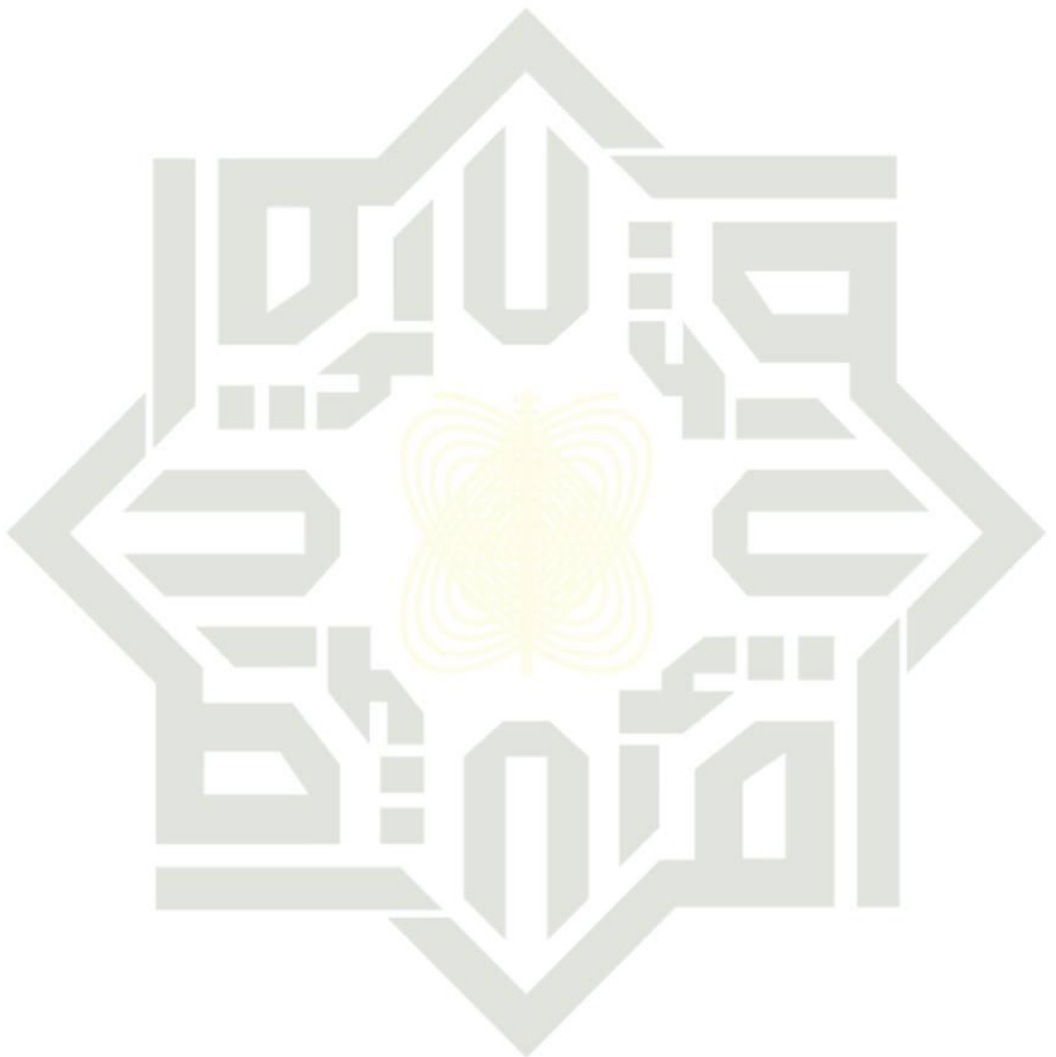
1. Belum tepatnya sasaran didalam pelaksanaan Bantuan stimulasi perumahan swadaya (BSPS) . Hal ini bisa kita lihat dari yang menagajukan tidak sesuai dengan yang mendapatkan bantuan.
2. Belum meratanya penerima Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya. Hal ini terlihat banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

2.2 Saran

Demi tercapainya pelaksanaan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar yang lebih baik lagi, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Kepada Tim Pelaksana kegiatan harus dapat menyalurkan komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tim pelaksana harus bisa mengoptimalkan dalam Sumber Daya seperti Staf, Informasi, Wewenang, dan Fasilitas.
3. Diharapkan kepada Pemerintah harus dapat melihat Kecendrungan-kecendrungan atau disposisi, ini merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.
4. Selanjutnya diharapkan kepada pemerintah harus melihat struktur birokrasi, karna birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering menjadi pelaksanaan kegiatan. Implementasi kebijakan yang bersifat

kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kegiatan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul, Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul, Syani. 2002. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Jakarta: Lemhannas RI
- Anwar, Yesmil, 2013. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: Refika Aditama
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Djazuli A. 2009. *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana
- Istijanto. 2006. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagong, Suyanto. 1996. *Perangkat Kemiskinan Promblema dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan*. Jakarta : Aditya Media
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Perenada Media Group
- Sagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan Konsep, Demensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2013. *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta
- Zinarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Perumahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 39 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dengan Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir dan Miskin di Kabupaten Kampar

DAFTAR WAWANCARA

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA KOTO TUO BARAT KECAMATAN X111 KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018

1. Bagaimana cara Pemerintah Desa dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang BSPS?
2. Siapa yang menentukan indikator warga yang memenuhi syarat untuk bantuan tersebut?
3. Apa saja syarat-syarat peserta program BSPS tersebut?
4. Apakah program tersebut tepat sasaran?
5. Siapa yang membuat keputusan dalam program BSPS tersebut?
6. Apakah Pemerintah melakukan sosialisasi BSPS melalui media sosial?
7. Bagaimana pelaksanaan BSPS tersebut ?
8. Siapa saja sasaran yang mendapatkan BSPS tersebut?
9. Apa manfaat BSPS bagi masyarakat miskin tersebut?
10. Apa dampak positif BSPS tersebut?
11. Apa saja dasar hukum BSPS tersebut?
12. Siapa yang membuat keputusan dalam menentukan pemilihan calon-calon penerima bantuan tersebut?
13. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan BSPS?
14. Hal apa sajakah yang dipersiapkan dalam menerima BSPS?
15. Kapan Program BSPS berlangsung di desa ini?
16. Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut?
17. Kenapa Program tersebut harus di laksanakan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

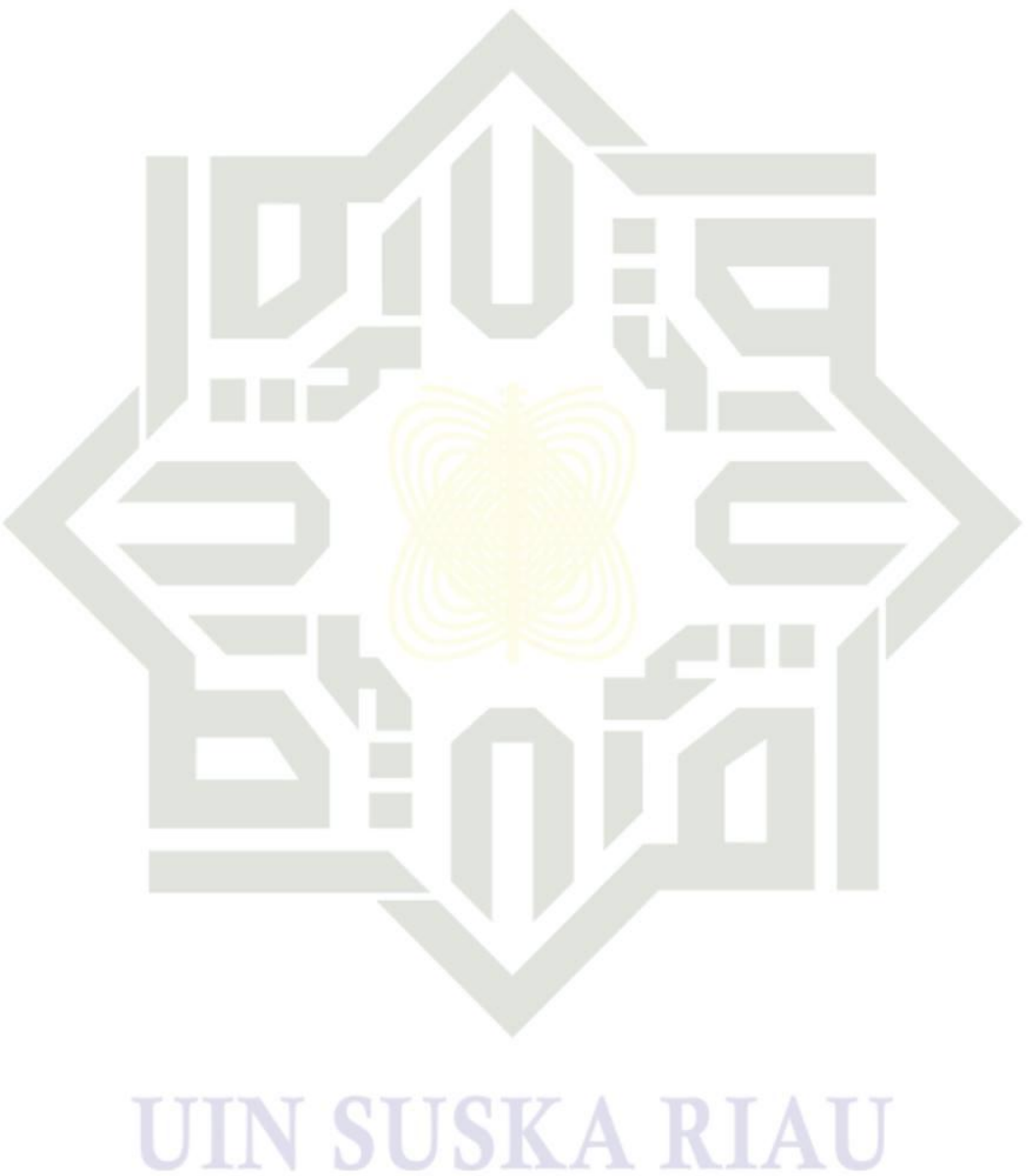
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Apakah semua yang mendapatkan bantuan memenuhi syarat yang telah di tentukan?
19. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi program tersebut/
20. Bagaimana keberhasilan dari program tersebut/

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/PRT/M/2018
TENTANG
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, diperlukan bantuan stimulan rumah swadaya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2 -

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
3. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
4. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4 -

7. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
8. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan pemunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
12. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
13. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
14. Penerima BSPS adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh PPK.

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5 -

15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSFS.
16. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan BSFS.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar penyelenggaraan BSFS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. bentuk BSFS;
- b. jenis kegiatan dan besaran BSFS;
- c. penerima BSFS;
- d. penyelenggaraan BSFS; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

BENTUK BSFS

Pasal 4

- (1) Bentuk BSFS berupa:
 - a. uang; dan
 - b. barang.

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6 -

- (2) BSPS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima BSPS.
- (3) BSPS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
- (4) BSPS berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRS.

BAB III

JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSPS

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan BSPS terdiri atas:
 - a. PKRS; dan
 - b. PBRS.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7 -

Pasal 6

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penerima BSPS yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penerima BSFS dengan persyaratan:

- a. pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total; atau
- b. pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

Pasal 8

Jenis kegiatan BSFS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. Rumah yang terdampak bencana;
- b. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
- c. Rumah tradisional (*local genius*) dengan ukuran lantai paling luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi).

Pasal 9

- (1) Pembangunan PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mengelompok dalam 1 (satu) hamparan;
 - b. paling sedikit 15 (lima belas) unit Rumah Penerima BSFS kegiatan PBRS; dan
 - c. mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan dan/atau drainase lingkungan.

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8 -

- (3) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 10

Besaran nilai BSPS untuk jenis kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV PENERIMA BSPS

Pasal 11

- (1) Penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9 -

- a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
- b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
- d. ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

BAB V

PENYELENGGARAAN BSPS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan BSPS meliputi tahapan:

- a. pengusulan lokasi BSPS;
- b. penetapan lokasi;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. penetapan calon Penerima BSPS;
- e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS bentuk uang;
- f. pengadaan dan penyerahan BSPS bentuk barang; dan
- g. pelaporan.

Bagian Kedua

Pengusulan Lokasi BSPS

Pasal 13

- (1) Usulan lokasi BSPS ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal yang dilakukan oleh:
 - a. bupati/walikota dengan tembusan gubernur; atau
 - b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Usulan lokasi BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data:
 - a. jumlah Rumah tidak layak huni; dan

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10 -

- b. jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya.
- (3) Usulan lokasi BSPS yang dilakukan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah provinsi.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melakukan verifikasi.
- (5) Usulan lokasi BSPS yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah provinsi dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berdasarkan:
 - a. tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota;
 - b. proporsi jumlah Rumah tidak layak huni terhadap jumlah Rumah di daerah kabupaten/kota;
 - c. proporsi jumlah kekurangan Rumah terhadap jumlah rumah tangga di daerah kabupaten/kota;
 - d. kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan; dan
 - e. program prioritas Pemerintah Pusat.
- (2) Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. mempunyai data Rumah tidak layak huni dan kekurangan Rumah yang mutakhir;
 - b. mempunyai program bantuan pemerintah daerah dalam bidang perumahan;
 - c. menyediakan dana pendamping kegiatan BSPS dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan BSPS tahun sebelumnya.

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11 -

- (3) Program prioritas Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. perintah langsung Presiden;
 - b. program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. kegiatan berdasarkan usulan kementerian/lembaga/lembaga tinggi negara sesuai basis data terpadu atau data lapangan; dan/atau
 - d. kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan PBRIS dalam 1 (satu) hamparan telah selesai maka KPB dapat mengusulkan PSU kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Usulan PSU oleh KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. bupati/walikota dengan tembusan gubernur; atau
 - b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Usulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Bagian Ketiga Penetapan Lokasi

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 14 ayat (1), dilakukan penetapan lokasi BSPS.
- (2) Lokasi BSPS untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Lokasi BSPS untuk desa/kelurahan ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan lokasi BSPS yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12 -

Bagian Keempat
Penyiapan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BSPS.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BSPS.
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 18

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. verifikasi calon Penerima BSPS;
 - c. kesepakatan calon Penerima BSPS; dan
 - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan calon Penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. menentukan calon Penerima BSPS;
 - b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BSPS; dan
 - c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.
- (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 13 -

- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BSPS.
- (7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BSPS.

Pasal 19

- (1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BSPS.
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang ditunjuk oleh PPK.
- (3) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Penerima BSPS

Pasal 20

- (1) PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon Penerima BSPS.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima BSPS ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA/Kepala Satker sebagai Penerima BSPS.

Bagian Keenam

Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan BSPS Bentuk Uang

Pasal 21

Pencairan BSPS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 14 -

Pasal 22

Penyaluran BSPS bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening Penerima BSPS dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSPS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSPS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSPS.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (4) Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BSPS.
- (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.
- (6) KPA/Kepala Satker dapat menetapkan pemanfaatan BSPS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi:
 - a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
 - b. kesulitan akses ke lokasi.

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 15 -

- (7) Pemanfaatan BSPS dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan analisa kelayakan.

Bagian Ketujuh

Pengadaan dan Penyerahan BSPS Bentuk Barang

Pasal 24

Pengadaan BSPS bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 25

Penyerahan BSPS bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Penerima BSPS didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSPS kepada PPK.
- (2) Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BSPS kepada PPK.
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui koordinator fasilitator tembusan kepada Dinas.
- (4) Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK tembusan kepada Dinas.
- (5) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BSPS kepada KPA/Kepala Satker.
- (6) KPA/Kepala Satker menyampaikan laporan kegiatan BSPS kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Rumah Swadaya.

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 16 -

Bagian Kesembilan Petunjuk Teknis

Pasal 27

- (1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan BSPS ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. persiapan BSPS;
 - b. pelaksanaan BSPS; dan
 - c. pelaporan BSPS.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BSPS.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BSPS, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon Penerima BSPS, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPA/Kepala Satker dengan melibatkan Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA/Kepala Satker dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perorangan atau badan usaha.

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 17 -

Pasal 29

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSPS.

Pasal 30

- (1) BSPS yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal Penerima BSPS tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka BSPS dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum BSPS disalurkan.
- (3) Dalam hal penerima BSPS menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BSPS maka dilakukan penarikan kembali oleh KPB setelah dana BSPS disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Negara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

- a. proposal kegiatan BSPS yang telah diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dilakukan penyesuaian oleh PPK berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- b. lokasi BSPS yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 18 -

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 403

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini
NIP. 195803311984122001

JDIH Kementerian PUPR

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama kepala desa Koto Tuo Barat Bapak Rinaldi, S.Pd



Wawancara bersama kepala dusun 1 bapak Zulpani

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama salah satu masyarakat yang mendapatkan bantuan BPS yang bernama Muhijar yang di wakilkkan istrinya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama masyarakat yang mendapatkan bantuan BPS yang bernama Bapak Masrizal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama masyarakat yang mendapatkan bantuan BSPS yang bernama Bapak Taupik yang di wakilkkan istrinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama masyarakat yang mendapatkan bantuan BPS yang bernama Zuherman pelani yang di wakikan istrinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Kepala Desun 11 yang bernama bapak Husni Padul.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Kepala Dusun 111 yang bernama bapak Jon Hendri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Kepala Dusun 1V yang bernama Bapak Muhammad Ansyor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2686/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 08 April 2019 M
2 Sya'ban 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Riska Amini
NIM. : 11575204728
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) di
Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar
Tahun 2018" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan
bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2685/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 08 April 2019 M
2 Sya'ban 1440 H

Kepada
Yth. **Dr. Rodi Wahyudi, S. Sos, M. Soc**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : RISKA AMINI
NIM : 11575204728
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2018**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/415

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/21883 tanggal 22 April 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : RISKA AMINI |
| 2. NIM | : 11575204728 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA KOTO TUA BARAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 |
| 8. Lokasi | : DESA KOTO TUA BARAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 22 Mei 2019

an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kasi. Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat XIII Koto Kampar Di Batu Bersurat
2. Kepala Desa Koto Tuo Barat Di XIII Koto Kampar
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR DESA KOTO TUO BARAT

Alamat : Jl. Raya Candi Muara Takus XIII Koto Kampar KodePos : 28453

Koto Tuo Barat, 30 Agustus 2019

Nomor : 070/PEM-KTB/228
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Riset
Kepada Yth : DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN ILMU SOSIAL
di PEKANBARU

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu alaikum, wr. wb

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/KKBP/2019 Perihal
Rekomendasi Riset dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama : RISKA AMINI
Nim : 11575204728
Universitas : UIN Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru
Program studi : Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1(S.1)
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULASI
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA KOTO TUO BARAT
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2018
Lokasi Penelitian : Desa koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto kampar Kabupaten
Kampar Provinsi Riau

Untuk melaksanakan Penelitian di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar dengan judul
tersebut di atas. Sehubungan dengan hal tersebut pihak kami tidak keberatan dilaksanakannya
penelitian dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Riset/penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset/pengumpulan data berlangsung 6 (Enam) bulan terhitung tanggal
rekomendasi ini diterbitkan.

Demikian kami sampaikan, untuk dimaklumi dan digunakan seperlunya

Wassalamu'alaikum, wr. wb

Kepala Desa

RINALDI, S.Pd.I

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/21883
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2686/2019 Tanggal 8 April 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

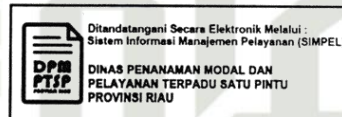
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : RISK A AMINI |
| 2. NIM / KTP | : 11575204728 |
| 3. Program Studi | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA KOTO TUA BARAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA KOTO TUA BARAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 April 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb

RISKA AMINI lahir pada tanggal 14

Oktober 1996 di Desa Kototuo Kec. XIII Koto Kampar, Kab. Kampar Provinsi Riau. Penulis merupakan anak ke Pertama dari 3 bersaudara dari ayah yang bernama Yusmar dan ibu yang bernama Eri Murniati, serta mempunyai adik yang bernama M.Ridho Ilahi dan Amelia Sakina.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh adalah sebagai berikut, Sekolah Dasar 011 Kototuo dan tamat pada tahun 2009, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada SMPN 2 XIII Koto Kampar dan selesai pada tahun 2012. Pendidikan Sekolah Menengah Atas SMAN 1 XIII Koto Kampar Kab. Kampar , tamat pada tahun 2015. Melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negri Sultan Syarif kasim Riau, Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada dan selesai pada tahun 2019

Penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA KOTO TUO BARAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR”**

Alhamdulillah pada tanggal 27 September 2019 dinyatakan **LULUS** setelah mengikuti ujian munaqasah dengan predikat C, dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Wassalamu'alaikum Wr.WB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.